

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Humas Pemerintah Kota merupakan organisasi bagian Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertugas mengurus hubungan masyarakat dan informasi. Lokasi Humas & Informasi Kota Yogyakarta berkedudukan di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta 55165.

1. Sejarah dan Perkembangan Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Humas dahulu berada dibawah Bagian Umum Setda Kotamadya Yogyakarta, yaitu menurut SK Walikota Nomor 174 Tahun 1973. Kemudian diperbaharui dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No 5 Tahun 1979. Menurut peraturan ini bagian Humas menjadi Sub Humas dan Protokol di bawah Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta.

Sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (6/OR/VII/1985) tanggal 5 Juli 1983 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 062 tanggal

15 Agustus 1983, maka Perda Nomor 5 tahun 1978 diperbaharui dengan Perda No 6 Tahun 1984.

Pertama kali Bagian Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bernama Bagian Humas dan Informasi. Kemudian di masa otonomi daerah, berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Humas dan Informasi berubah menjadi Kantor Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (KHI). KHI merupakan penggabungan antara bagian Humas dan eks Kantor Departemen Penerangan. Keberadaan KHI ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) No. 41 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi, tata kerja kantor Humas dan Informasi. Sebagaimana fungsi Humas pada umumnya, KHI berfungsi sebagai lembaga yang mengelola hubungan masyarakat dan memberikan pelayanan informasi.

Dapat dilihat, tidak hanya satu kali perubahan nama ini terjadi, pada Tahun 2005 bentuk Humas diubah menjadi Badan Informasi Daerah (BID). BID merupakan penggabungan dari bagian Humas, bagian Teknologi Informasi dan kantor Kearsipan Kota Yogyakarta. Terakhir kali perubahan humas ini terjadi pada tahun 2008 dan menggunakan nama Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta hingga sekarang.

Perubahan yang dialami beberapa kali tersebut dilakukan berdasarkan Perda Kota Yogyakarta yang selanjutnya sesuai dengan peraturan Walikota Yogyakarta. Bagian Humas dan Informasi ini berada dibawah kewenangan Setda. Walau berubah – ubah bentuk lembaganya, diharapkan supaya Humas dan Informasi ini dapat mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan dengan pola komunikasi yang juga selalu berubah – ubah. Untuk itu lembaga humas pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi sejelas – jelasnya.

Mengingat bahwa pada masa sekarang ini masyarakat sudah mulai kritis atas kemajuan teknologi komunikasi yang ada, sehingga perlu sekali untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dan damai sejahtera. Bagian Humas dengan format kelembagaan yang baru sekarang ini berupaya untuk dapat berubah dari paradigam lama yang hanya bertindak sebagai corong pemerintah kota, menuju paradigma baru sebagai praktisi kehumasan yang kompeten dan professional dengan didukung oleh sistem manajemen humas pemerintah daerah dalam iklim kerja yang dinamis dan kondusif demi kelancaran tugas kehumasan.

Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program – program di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Fokusnya adalah dimana Bagian Humas dan Informasi dibentuk selaku lembaga pemerintah yang khusus menangani seluruh urusan penyelenggaraan mengenai hubungan kemasyarakatan dan penyebarluasan informasi mengenai Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Visi dan Misi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Visi dan misi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta sesuai dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2011 dan sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tugas Pokok Setda dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah yaitu :

a. Visi dari Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

“Tersedianya informasi yang terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan”.

b. Misi dari Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

- 1) Membangun citra dan reputasi positif dari Pemerintah Kota Yogyakarta beserta aparaturinya.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media massa maupun media khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi kepada publik.
- 4) Membentuk opini publik yang positif.
- 5) Menciptakan kemitraan kerja yang harmonis secara internal dengan seluruh unit kerja di jajaran Pemkot Yogyakarta.
- 6) Menciptakan kemitraan kerja yang harmonis secara eksternal kepada pers dan lembaga masyarakat lainnya.
- 7) Mempublikasikan program dan kebijakan Pemkot Yogyakarta dengan meningkatkan jangkauan penyebaran.
- 8) Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat yang diterima melalui berbagai media pengaduan masyarakat.

- 9) Memberikan tanggapan dan mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat.
- 10) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemkot Yogyakarta.

3. Fungsi dan Tugas Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

- a. Fungsi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta yaitu sebagai penyelenggara hubungan masyarakat dan informasi.
- b. Sedangkan untuk tugas Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta yaitu :
 - 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan informasi.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Bagian Humas.
 - 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 4) Melaksanakan ketatausahaan.

5) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta.

4. Struktur Organisasi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Struktur organisasi humas didalam pemerintahan sama dengan posisi humas pada umumnya. Namun dengan bentuk yang baru ini strukturnya lebih ringkas dengan staf yang lebih sedikit pula. Posisi Bagian Humas dan Informasi adalah dibawah Sekretariat Daerah. Meskipun demikian, segala kegiatan Humas tetap dipertanggungjawabkan kepada Walikota. Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah dan berkaitan dengan unsur penyelenggaraan Humas dan Informasi. Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Humas : Drs. Yunianto Dwisutono
- b. Sub Bagian Humas : Bob Rinaldi, SH
- c. Sub Bagian Promosi dan Publikasi : Tedi Saparian, SE

d. Sub Bagian PIK : Drs. Nurpireno Yulianto

Khusus sub bagian Pengelolaan Informasi dan Keluhan juga membawahi bagian Tata Usaha yang mengurus penyimpanan data dan dokumentasi.

5. Rencana Kerja Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh Pemkot Yogyakarta. Setiap tahunnya Bagian Humas dan Informasi menyusun Rencana Kerja yang dianggarkan untuk tahun tersebut. Rencana Kerja tahunan tersebut diwujudkan melalui dua program utama, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Dan yang kedua adalah Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksanakan melalui lima kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Program Kota melalui berbagai media
2. Kegiatan pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).
3. Kegiatan penerbitan Majalah Ayodya.

4. Kegiatan Pameran Sekaten.
5. Kegiatan penyusunan Media Publikasi.

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui empat kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Operasional dan Layanan Kegiatan
 - a. Kliping dan pembuatan telaah kliping
 - b. Peliputan dan pembuatan *release* kegiatan Pemkot Yogyakarta
 - c. Jumpa Pers
 - d. Sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah Kota melalui media cetak, iklan layanan masyarakat, kerjasama penulisan, Advertorial, sosialisasi Perda, ajakan Walikota dan Tanya jawab Walikota melalui beberapa program acara di berbagai media.
2. Kegiatan Pengelolaan UPIK dan Koordinasi *Hotline*
 - a. SMS
 - b. *Email*
 - c. Telepon
 - d. *Website*
 - e. Sarasehan
 - f. Sosialisasi

3. Kegiatan Peningkatan Promosi dan Publikasi

- a. Penerbitan Koran Media Info Kota dan majalah Ayodya.
- b. Sosialisasi melalui berbagai media dan kegiatan, seperti ;
Program Walikota Menyapa, Gelora Pendidikan, Dialog Interaktif, Video Pidato Walikota pada HUT RI, penyebarluasan tema HUT RI melalui *website* Pemerintah Kota Yogyakarta, dll.
- c. Sosialisasi kebijakan atau kegiatan melalui media luar ruang seperti spanduk, baliho, penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui *big screen (videotron)*.

Era kepemimpinan Walikota Herry Zudianto mempunyai arah menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang berhasil meletakkan kerangka dasar atau prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam praktek penyelenggaraannya yaitu transparansi, kredibel, akuntability, efektif dan efisien, responsif, terbuka, partisipatif, rule of law, equity, consensus dan bervisi.

Keterbukaan yang dimaksud adalah membangun kepercayaan dengan kebebasan arus informasi sehingga semua proses penyelenggaraan

pemerintahan semaksimal mungkin dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh public.

Untuk mewujudkan keterbukaan itu, telah dibuka Hotline 24 jam melalui telepon, Short Message Service (SMS) maupun fax, agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan secara cepat mendapat tanggapan. Saluran yang dapat dihubungi adalah telepon dengan nomor (0274) 555241, 555242, SMS melalui nomor 081 2278 0001 dan 2740 untuk semua jenis provider, serta Fax dengan nomor 555241.

Di era informasi global, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan e-Government sebagai upaya pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Sejak 7 Oktober 2002, telah diluncurkan situs (website) resmi Pemerintah Kota Yogyakarta yang beralamat di : www.jogjakota.go.id. Pemanfaatan teknologi digital ini adalah sebagai keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mentransformasikan bentuk – bentuk interaksi antara Pemerintah dengan masyarakat yang selama ini terkesan terlampau birokratis menjadi hubungan yang lebih cepat dan bersahabat.

Selain itu, untuk mengetahui keluhan dan hal – hal yang dirasakan masyarakat secara langsung, telah dibentuk Unit Pelayanan Informasi dan

Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta yang merupakan fasilitas layanan informasi publik guna menjangkau informasi, keluhan/aduan, pertanyaan, usul/saran masyarakat dengan menggunakan media SMS, e-mail, telepon, pos, website, maupun datang langsung. UPIK merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kantor Humas dan Informasi Kota Yogyakarta.

Untuk membantu masyarakat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan perijinan dan pelayanan lainnya, telah diluncurkan Call Centre Halo Jogja dengan nomor 290274 pada 29 Juni 2004. Dengan adanya call centre ini, masyarakat dapat mengetahui tata cara pembuatan perijinan, jumlah biaya, jangka waktu, formulir yang harus diisi dan lain-lain. Pertanyaan yang masuk akan dijawab melalui mesin penjawab dengan pulsa lokal, yang dioperasikan selama 24 jam.

B. Profil Lokasi Pemkot Yogyakarta

Kantor Walikota Kota Yogyakarta atau yang biasanya disebut Balaikota terletak di Jl Kenari 56 Timoho Yogyakarta 55165.